

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

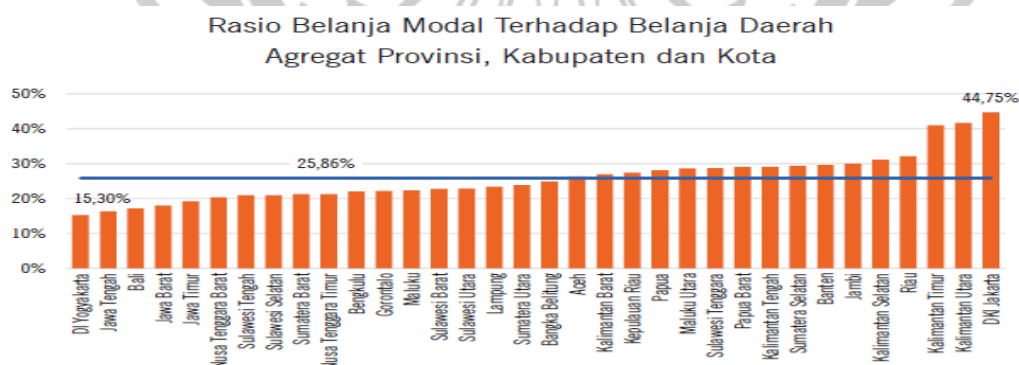
Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang membahas tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan utama adanya otonomi daerah. Lembar Negara Republik Indonesia.

(Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004), menjelaskan bahwa “Daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajibannya daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang–undangan.”

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pengelolaan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun dilaporkan oleh Pemerintah Daerah. APBD disusun oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD yang bertujuan untuk menentukan arah kebijakan umum daerah. Di dalam APBD suatu daerah terdapat belanja modal yang digunakan untuk tujuan meningkatkan aset tetap suatu daerah sesuai dengan kebutuhan daerah atau bermanfaat bagi masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang manfaatnya melebihi satu tahun. Belanja modal ini kemudian akan menambah aset atau kekayaan daerah serta menambah pengeluaran biaya rutin untuk operasional dan pemeliharaan. Untuk itu, pengelolaan keuangan yang baik

diperlukan pada setiap daerah. Selain itu, keberhasilan dalam mengatur keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan pengaturan pendapatan yang ada di dalam setiap keuangan pemerintah daerah, pengaturan belanja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan pengaturan pengeluaran biaya-biaya lain yang akan dikeluarkan. Namun faktanya, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran cenderung digunakan untuk belanja rutin daripada digunakan untuk belanja modal. Hal ini dapat diketahui dari bukti yang ada secara empiris dan adanya data absolut yang menyebutkan bahwa 34 provinsi, 18 provinsi memiliki rasio belanja modal di bawah rata-rata. Sedangkan, 16 provinsi sisanya memiliki rasio belanja modal berada di atas rata-rata. Dari keseluruhan provinsi, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki rasio terendah sebesar 15,3 persen, sedangkan rasio yang paling tinggi ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan rasio sebesar 44,75 persen. Dapat disimpulkan dari keseluruhan informasi yang didapat bahwa sebagian besar provinsi yang ada di Indonesia masih menganggarkan belanja modal dengan proporsi kurang dari 25 persen.

Gambar 1.1

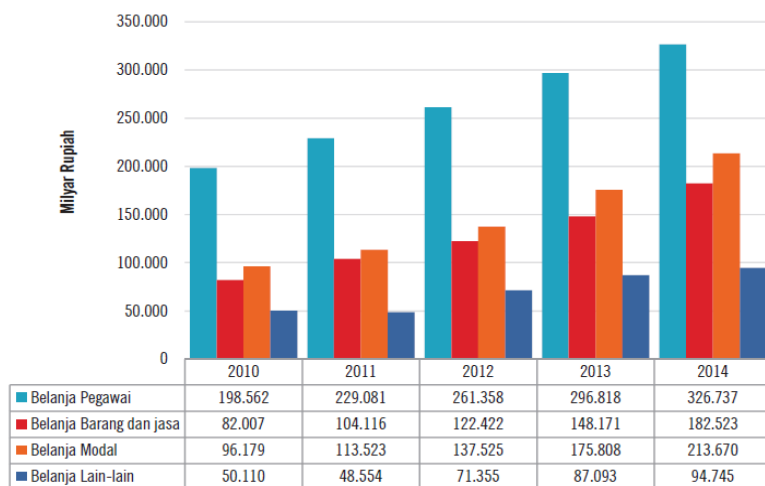


Sumber : DJPK - Depkeu

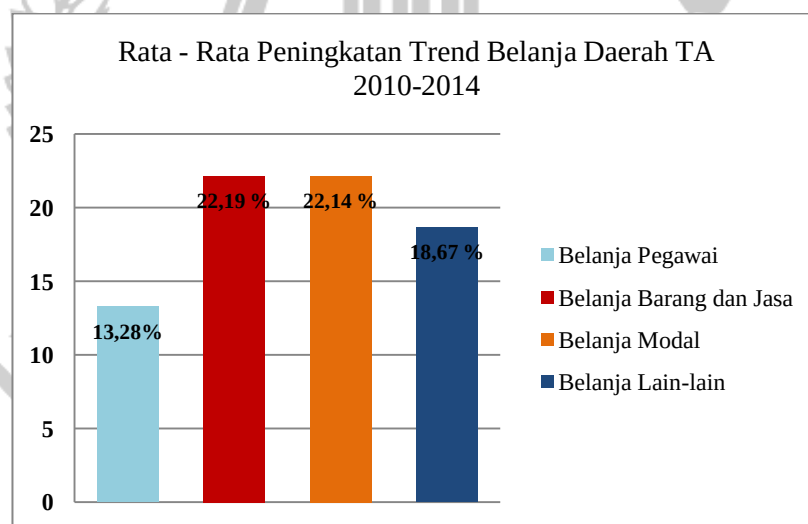
dan APBD 2014

Gambar 1.2

Trend Belanja Daerah TA 2010 – 2014 (dalam miliar rupiah)



Gambar 1.3



Sumber : DJPK – Depkeu dan Deskripsi
Analisis APBD 2014 (data dioalah)

Dari *trend* belanja daerah disebutkan variasi belanja daerah yang dilakukan. Terdapat empat macam belanaja daerah yang dilakukaan, yaitu belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja lain – lain (termasuk dalam belanja rutin daerah), serta belanja modal. Gambar tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap belanja daerah yang dilakukan setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2014. Untuk belanja pegawai rata – rata peningkatan pada tahun 2010 hingga 2014 sebesar 13,28 persen. Selanjutnya, untuk belanja barang dan jasa memiliki rata – rata peningkatan sebesar 22,19 persen untuk tahun 2010 hingga 2014. Kemudian untuk belanja modal rata – rata peningkatan yang terjadi sebesar 22,14 persen. Terakhir adalah belanja lain – lain yang memiliki rata – rata peningkatan sebesar 18,67 persen.

Dari gambar 1.3 rata-rata peningkatan *trend* belanja modal memang cukup tinggi. Tetapi, dalam gambar 1.1 dijelaskan bahwa rasio belanja modal untuk Provinsi Jawa Timur masih dibawah rata – rata, tepatnya masih di bawah 15,3 persen. Padahal, dari data Badan Pusat Statistik Tahun 2010 jumlah penduduk di Jawa Timur adalah 37.476.757 jiwa yang menduduki peringkat kedua sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak setelah Propinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk sebesar 43.053.732 jiwa. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Jawa Timur termasuk dalam daerah yang masih rendah dalam alokasi belanja modal.

Perlu digali apa yang menyebabkan rendahnya serapan belanja modal di Jawa Timur dengan menggunakan kinerja keuangan berupa rasio ketergantungan, kemandirian, efisiensi belanja dan ruang fiskal. Rasio tersebut dapat mempengaruhi belanja modal suatu daerah karena dari rasio ketergantungan dapat diketahui seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah

pusat dalam hal pengelolaan anggaran daerah. Kemudian, dari rasio kemandirian juga dapat dilihat seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah. Selain itu, rasio efisiensi belanja dapat dilihat dengan cara membandingkan realisasi dengan anggaran belanja suatu daerah. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dan rasio ruang fiskal yang dapat mengetahui seberapa besar rasio ruang fiskal yang dihitung dari pendapatan daerah yang dikurang dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dana penyesuaian, dana darurat, hibah, belanja pegawai, dan belanja bunga.

Terdapat perbedaan penelitian saat ini dengan beberapa peneliti sebelumnya. Perbedaan yang dimaksudkan adalah perbedaan sampel yang akan digunakan. Misalnya, pada penelitian Kadek Martini dan A.A.N.B. Dwirandra (2015), sampel yang dipilih adalah Provinsi Bali, sedangkan penelitian selanjutnya memilih sampel Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Perbedaan dan persamaan peneliti sekarang dengan sebelumnya dalam hal pemilihan variabel. Aula Ahmad Hafidh (2013) yang memilih menggunakan rasio kemandirian yang tidak digunakan pada peneliti sebelumnya, yang kemudian akan diuji kembali oleh peneliti selanjutnya. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Kadek Martini dan A.A.N.B. Dwirandra (2015) yang membahas mengenai rasio efisiensi yang memberikan kesimpulan bahwa rasio efisiensi memberikan hasil negatif dan signifikan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aula Ahmad Hafidh (2013) memberikan kesimpulan bahwa rasio efisiensi memiliki pengaruh positif dan signifikan. Rasio ketergantungan yang diteliti oleh Kadek memberikan hasil negatif dan signifikan, sedangkan dalam penelitian yang

dilakukan oleh Havid Sularso dan Yanuar E. Restianto (2011) menunjukkan hasil yang berpengaruh positif pada alokasi belanja modal. Untuk rasio ruang fiskal yang diteliti oleh Dihan Lucky (2013) menunjukkan pengaruh yang tidak langsung terhadap alokasi belanja modal, sedangkan pada penelitian Havid (2011) menunjukkan adanya pengaruh positif.

Dari perbedaan dan persamaan yang telah diuraikan, selanjutnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Rasio Ketergantungan, Kemandirian, Efisiensi dan Ruang Fiskal Terhadap Alokasi belanja modal Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang bertujuan agar dapat memberikan informasi yang lebih bervariasi pada alokasi belanja modal saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Apakah rasio ketergantungan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di Jawa Timur?
2. Apakah rasio kemandirian berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di Jawa Timur?
3. Apakah rasio efisiensi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di Jawa Timur?
4. Apakah rasio ruang fiskal berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh rasio ketergantungan terhadap alokasi belanja modal di Jawa Timur.
2. Mengetahui pengaruh rasio kemandirian terhadap alokasi belanja modal di Jawa Timur.
3. Mengetahui pengaruh rasio efisiensi terhadap alokasi belanja modal di Jawa Timur.
4. Mengetahui pengaruh rasio ruang fiskal terhadap alokasi belanja modal di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam pengelolaan anggaran daerah dalam hal belanja modal agar dapat tercipta kemandirian daerah yang akan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.
- b. Memberikan gambaran agar dapat meningkatkan pengalokasian pada belanja modal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- c. Dapat membantu menambah pengetahuan mengenai alokasi belanja modal pada daerah pemerintahan dan berguna sebagai referensi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi dapat dikemukakan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yaitu alokasi belanja modal daerah pemerintahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang berisikan tentang alokasi belanja modal, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio efisiensi dan rasio ruang fiskal. Landasan teori ini digunakan sebagai landasan berpikir dan menganalisis permasalahan yang ada.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode – metode yang dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terdiri dari pendekatan penelitian yang digunakan dan teknik analisis data apa yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi mengenai gambaran atau deskripsi mengenai variabel yang dipaki serta menganalisa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang didapat oleh peneliti yang diambil dari tahapan penelitian yang dilakukan. Bab ini juga berisi keterbatasan dan kelamahan penelitian serta saran yang akan dapat mengembangkan penelitian selanjutnya.

